

PELAKSANAAN KEBIJAKAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2006-2015

Ditasman

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Advertising Policy Implementation in Pekanbaru Year 2006-2015. This study aims to describe the analysis of the implementation of the policy of billboards in the city of Pekanbaru. As for the issue of this research is to know how the policy deploy billboards in the city of Pekanbaru and anyone actors involved in the implementation of policies advertisement. The research problem is motivated by the Mayor passed regulations No. 24 of 2013 concerning the organization of billboards in the city of Pekanbaru. This causes a conflict of businessmen and community organizers billboard advertisement rejecting the Mayor policy. The mayor's policies have not been successful in the process of policy Communication, Process Resource policies billboard, advertisement policy disposition process and Bureaucratic Structure advertisement policy, which did not go well. This study used qualitative methods. namely data obtained by interview, observation, documentation and then analyzed qualitatively The theory used was Edward III. The results showed that the implementation of the policy of billboards in the city of Pekanbaru already implemented policy administration billboards but the results have not been effective due to lack of attention to process Communication policies, processes resource policies, processes disposis policies and structures Bureaucratic Policy billboards, Among the successful analysis of policy implementation billboards by the Government Pekanbaru city not proved instrumental in the process Communication policies, processes resource policies, processes and policies disposition policies bureaucratic structure.

Abstrak: Pelaksanaan Kebijakan Reklame di Kota Pekanbaru Tahun 2006-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan analisis pelaksanaan kebijakan billboard di Kota Pekanbaru. Adapun masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan menyebabkan billboard di kota Pekanbaru dan aktor siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan iklan. Masalah penelitian ini dilatarbelakangi oleh Walikota melewati peraturan Nomor 24 tahun 2013 tentang organisasi dari billboard di Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan konflik pengusaha dan penyelenggara komunitas iklan billboard menolak kebijakan Walikota. kebijakan walikota belum berhasil dalam proses komunikasi kebijakan, Proses kebijakan Sumber Daya billboard, proses disposisi kebijakan iklan dan Struktur Birokrasi iklan kebijakan, yang tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan kemudian dianalisis secara kualitatif Teori yang digunakan adalah Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan billboard di kota Pekanbaru sudah dilaksanakan billboard administrasi kebijakan tetapi hasilnya belum efektif karena kurangnya perhatian untuk memproses kebijakan Komunikasi, proses kebijakan sumber daya, proses kebijakan disposis dan struktur billboard Kebijakan Birokrasi, antara analisis keberhasilan implementasi kebijakan billboard dengan kota Pekanbaru Pemerintah tidak terbukti berperan dalam kebijakan Komunikasi proses, proses kebijakan sumber daya, proses dan kebijakan kebijakan disposisi struktur birokrasi.

Kata kunci: kebijakan, aktor, minat

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru dan reklame (khususnya reklame insidental) merupakan pemandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Mau tak mau anggapan ini harus diakui. Lebih lagi ketika bagaimana ruang-ruang publik didominasi oleh *billboard-billboard* berukuran besar dan atribut-atribut kampanye yang berserakan dimana-mana, tanpa adanya pertimbangan dengan ukuran ruang itu sendiri, sehingga dapat merusak keindahan kota dan dapat mengorbankan kepentingan umum dan fasilitas umum demi reklame

yang seluruhnya memproduksi citraan-citraan budaya konsumsi. Dan setiap orang dalam ruang yang disesaknya diprovokasi ke dalam citraan-citraan tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman mobilitas budaya pun terus berkembang, ini mungkin juga merupakan konsekuensi dari perkembangan mobilitas budaya itu sendiri, ketika ruang *out-door* lebih banyak menjadi ruang hidup masyarakat. Dari mulai aktivitas kerja, sekolah, hingga berjalan-jalan yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Maka tak ayal

lagi, ketika ruang *outdoor* menjadi ruang yang dianggap efektif untuk mempromosikan segala produk maupun ajakan yang ditampilkan dengan berbagai desain.

Hal tersebut di tambah pula dengan adanya momen Pilkada serentak (pemilihan kepala daerah) yang akan diselenggarakan pada akhir-akhir tahun ini yakni pada bulan Desember 2015, semuanya berlangsung dalam keramaian atribut-atribut kampanye baik perseorangan maupun golongan yang berserakan dimana-mana yang nyaris tanpa kontrol. Seluruh ruang terutama ruang-ruang publik yang menjadi potensi keramaian telah menjadi komoditas bagi kepentingan-kepentingan kegiatan pemerintahan ini, tanpa pertimbangan kepatutan, etika, lebih lagi estetika, kepentingan hak publik atas ruang hanya menjadi pertimbangan yang kesekian.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan papan reklame dan penetapan kenaikan tarif pajak reklame, merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari analisis Pelaksanaan kebijakan. Kebijakan kenaikan tarif pajak reklame, pada hakekatnya merupakan sebuah problem perkotaan yang dipandang secara berbeda oleh aktor-aktor perkotaan itu sendiri. Dimana disatu sisi terdapat kelompok yang memandang bahwa dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak reklame akan mengatasi permasalahan reklame di Kota Pekanbaru yang selalu menjaga pada keindahan kota dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan disisi yang lain terdapat beberapa kelompok yang melihat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang malah merugikan pemerintah kota, karena kota akan berpotensi kehilangan sumber pendapatan daerah dari dunia periklanan. Selain itu, bagi kelompok ini, keputusan kelompok yang mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif reklame, merupakan keputusan akan sebuah kebijakan yang menyalahi prosedur karena tidak melalui proses *sharing* dengan lembaga lain.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang me-

nimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan (Winarno, 2005). Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isu-isu teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan analisis pelaksanaan kebijakan billboard di Kota Pekanbaru. Adapun masalah dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan menyebarkan billboard di Kota Pekanbaru dan aktor siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan iklan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba mencari penjelasan yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, obyek, proses dan manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan hubungan dalam dan antara variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Implementasi Kebijakan Reklame

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalannya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana Kebijakan Reklame di Kota Pekanbaru, komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan reklame, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar aparatur pelaksana kebijakan reklame di Kota Pekanbaru khususnya para aparatur dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Transmisi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Penyaluran komunikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam implementasi kebijakan reklame akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur. Proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan reklame di Kota Pekanbaru, belum begitu jelas dan belum dapat dimengerti.

Konsistensi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya kebijakan reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota No 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraann reklame yang telah ditentukan.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Sumber daya dalam implementasi kebijakan reklame memiliki beberapa komponen, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff,

keahlian dari para pelaksana, cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan reklame di Kota Pekanbaru, adanya kewenangan yang menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kebijakan reklame.

Staff dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana kebijakan reklame terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana kebijakan untuk melakukan pelatihan kemampuan. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja aparatur. Ketidakkampuan dalam pelaksanaan kebijakan reklame disebabkan karena kebijakan merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan kebijakan membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai komputer.

Informasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan, kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Wewenang dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi bukan saja wibawa lembaga itu saja dalam implementasi kebijakan reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan, di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Fasilitas dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Pelaksana kebijakan memerlukan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Sumber daya peralatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari: peralatan umum yang dibutuhkan oleh suatu lembaga dan peralatan khusus untuk kepentingan tertentu. Penyiapan peralatan umum diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan kerja, seperti adanya kenyamanan untuk di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kondisi kerja yang nyaman harus ditunjang oleh peralatan yang lengkap dan terpelihara. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Salah satu faktor yang mempengaruhi efek-

tifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat informasi dalam kebijakan reklame mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut mengetahui apa saja yang dilakukan dan bagaimana aparatur melakukan sebuah kebijakan reklame. kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Komitmen dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan reklame menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan reklame di Kota Pekanbaru hambatan-hambatan yang sering muncul adalah ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan diterapkan.

Kejujuran dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Kejujuran atau mengubah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi Kejujuran oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi kebijakan reklame di kota Pekanbaru. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan. Sifat keterbukaan karena para aparatur terkadang me-

nangguhkan suatu keputusan yang mereka setuju dalam rencana peningkatan tujuan yang ingin dicapai, terkadang para aparatur menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan memandang selektif. Sikap aparatur di Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan implementasi kebijakan reklame, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk akselerasi pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat membantu proses pelaksanaan kebijakan reklame.

Sifat Demokratik dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Sifat demokratik aparatur di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas. Aparatur di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penikmat dari kebijakan reklame, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan, maka aparatur dapat memberikan kritik kepada operator pelaksana kebijakan reklame, apabila kebijakan yang mereka terapkan tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal menciptakan akselerasi pelaksanaan tugas oleh aparatur.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan reklame, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operating Procedures (SOP) dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Standard operating procedures, merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan reklame. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para

aparatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasional, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan reklame untuk menciptakan pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisien. Dengan adanya standar operasional pelaksanaan, maka implementasi kebijakan reklame akan tercapai sehingga dapat menciptakan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien dan akurat.

Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan reklame. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksanaan kebijakan yang berlangsung kurang baik, hal tersebut dilihat melalui pola kinerja mereka yang kurang bekerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan reklame. Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas kurang saling membantu dan kurangnya kerjasama dalam mencapai keberhasilan kebijakan reklame.

SIMPULAN

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame namun hasilnya masih belum efektif karena kurang memperhatikan proses komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi kebijakan, dan struktur birokrasi, antara keberhasilan analisis pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak terbukti berperan dalam proses komunikasi kebijakan, proses sumber daya, proses disposisi kebijakan dan struktur birokrasi. Kendala-kendala dalam analisis kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah:

- Proses Komunikasi dalam Kebijakan
- a) Transmisi dalam kebijakan reklame
 - b) Kejelasan dalam kebijakan reklame
 - c) Konsistensi dalam kebijakan reklame
- Sumber Daya dalam Kebijakan Reklame
- a) Staff dalam kebijakan reklame
 - b) Proses proses informasi dalam kebijakan reklame
 - c) Wewenang dalam Kebijakan Reklame.
 - d) Fasilitas dalam kebijakan reklame
- Disposisi dalam Kebijakan Reklame
- a) Komitmen dalam Implementasi Kebijakan reklame
 - b) Kejujuran dalam Implementasi Kebijakan reklame
 - c) Sifat Demokratik dalam Implementasi kebijakan reklame
- Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Reklame
- a) Standar Operating Procedures (SOP), dalam Implementasi Kebijakan reklame
 - b) Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Reklame

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, 2010. *Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Dwidjowijoto, 2004. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Friedrich, 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Karya Pemuda
- Hadari Nawawi, 2001. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Hogwood, and Gunn, 2005. *Policy Analysis*. Oxford University Press
- Luankali, 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mangkunegara, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mazmanian dan Sebastiar, 2004. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, 2003. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Winarno, 2005. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UMY
- Winarno, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Grasindo.